



DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



RENCANA AKSI REHABILITASI HUTAN MANGROVE DI INDONESIA

Ir. Joko Pramono, MSc
Sub Direktorat Reboisasi

Sarasehan Konservasi Ekosistem Mangrove
sebagai Sistem Penyangga Kehidupan
Fakultas Kehutanan IPB

PERAN DAN FUNGSI MANGROVE

Mangrove



Penyerap polutan

Mencegah intrusi air laut

Penelitian dan pendidikan

Penyimpan karbon yang tinggi

Pengembangan wisata alam

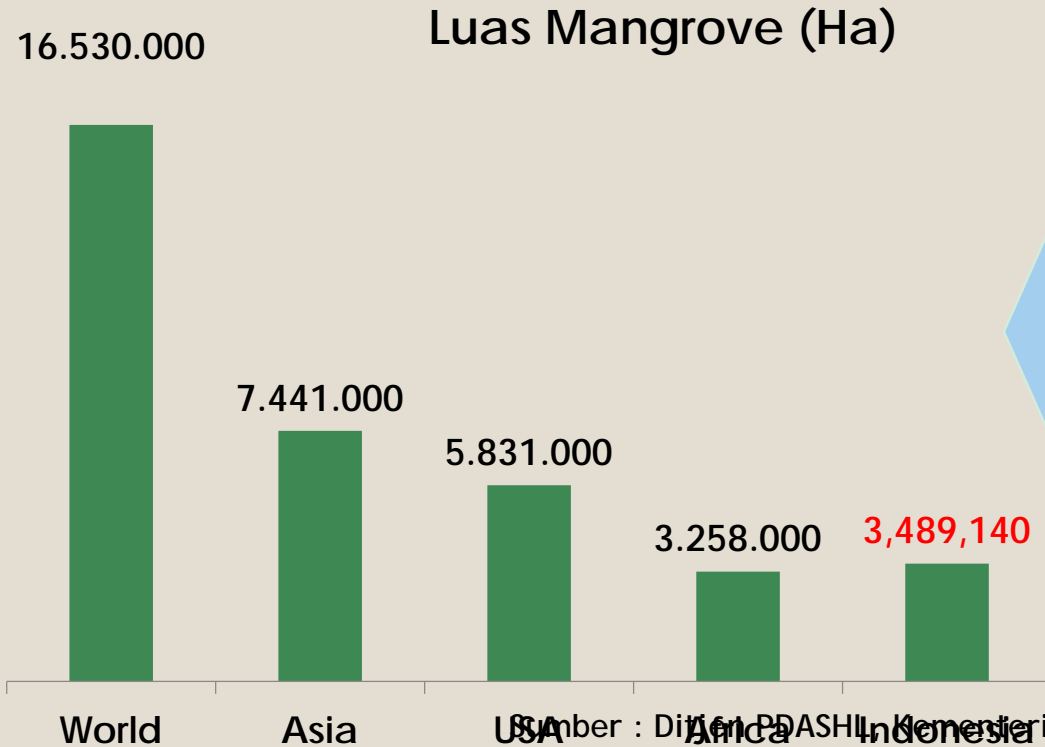
Tempat berpijah aneka biota laut

Pelindung garis pantai dari abrasi dan tsunami

Menyediakan hasil hutan berupa kayu dan non kayu

Tempat berlindung dan berkembang biak berbagai jenis fauna ekosistem payau

MANGROVE INDONESIA VS DUNIA



- 21% dari total luas mangrove dunia
- Luas mangrove 3,49 juta Ha

Sumber : Dirjen PDASH, Kementerian LHK



KONDISI LUAS MANGROVE INDONESIA

Luas mangrove Indonesia
3.49 jt ha (21 %) dari
luas mangrove dunia

257 Kabupaten/Kota
(dari 515)

1,82 juta ha kritis:

- dlm kws htn 1,27 juta ha
- luar kws htn 0,55 juta ha

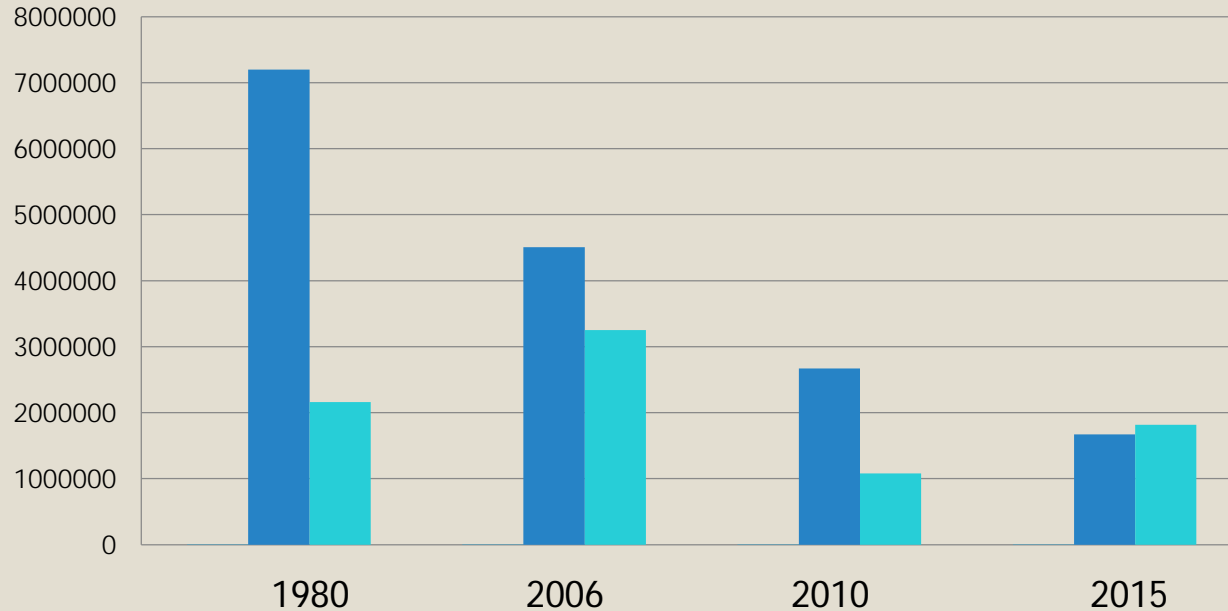
1,67 juta ha baik:

- dlm kws htn 0,9 juta ha
- luar kws htn 0,77 juta ha





PENURUNAN KONDISI MANGROVE DI INDONESIA



No.	Tahun	Kondisi Mangrove (Ha)		Jumlah (Ha)
		Baik	Rusak	
1	1980	7.200.022,80	2.161.934,79	9.361.957,59
2	2006	4.508.046,96	3.250.363,63	7.758.410,60
3	2010	2.670.000,00	1.080.000,00	3.750.000,00
4	2015	1.671.140,75	1.817.999,93	3.489.140,69



PERMASALAH EKOSISTEM MANGROVE

- Konversi hutan dan lahan mangrove meningkat (perkebunan, tambak, sarpras, pemukiman, illegal logging dll)
- Abrasi dan intrusi air laut meningkat
- Kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan Mangrove masih rendah
- Kelembagaan mangrove di tingkat pusat maupun daerah belum berkembang dengan baik
- Kebijakan pengembangan ekosistem mangrove belum menjadi prioritas baik di pusat maupun daerah
- Alokasi anggaran untuk pengembangan potensi dan RHL mangrove relatif rendah
- Potensi ekosistem mangrove untuk pengembangan hbk, wisata dan jasa lingkungan belum dikembangkan dengan baik

RENCANA AKSI RHL MANGROVE

Fungsi dan manfaat

Memiliki potensi meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Problem dan masalah Lintas Sektor

Kondisi Mangrove Rusak dan kritis

Pemulihan Mangrove Sebagai Penyangga kehidupan

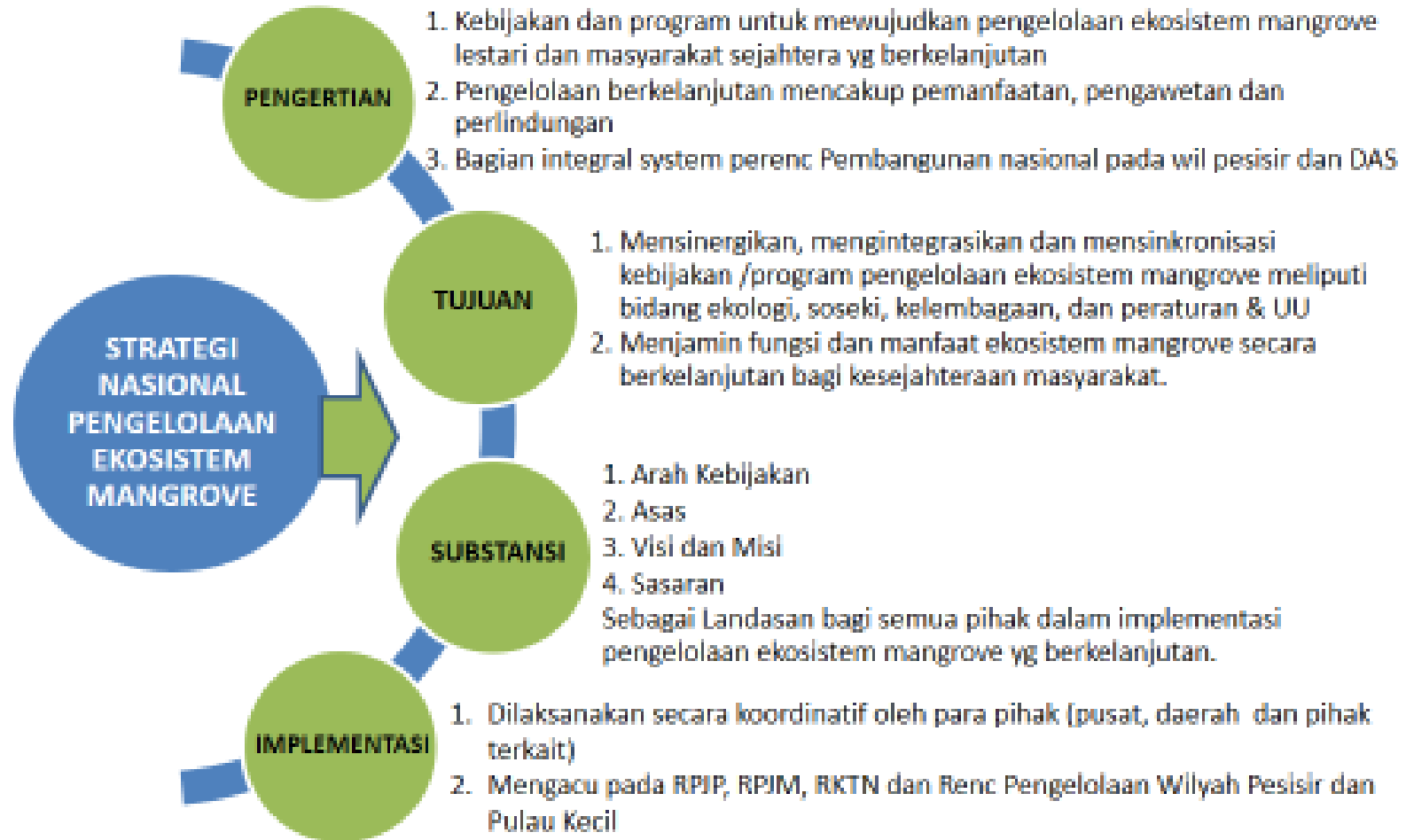
Startegi, Kebijakan Program pemulihan Konservasi dan pemanfaatan mangrove (Stranas)

Program RHL Mangrove

Rencana Aksi RHL Mangrove

1. Internal KLHK (RPJM 2015-2019)
2. Permenko No 4 Tahun 2017

STRANAS PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE (PERPRES 73 TAHUN 2012)



PERMENKO PEREKONOMIAN NO 4 TAHUN 2017



DISTRIBUSI II

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU KETUA PENGARAH TIM KOORDINASI NASIONAL
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE NASIONAL

**Mangrove yang baik : 1,69 Juta
Hektar**

**Mangrove yang rusak: 1,80 Juta
Hektar**

**→ Target Rehabilitasi 65.000
ha/tahun**

→ Lokasi harus dipastikan

A. Target Pemulihan Ekosistem Mangrove

Dengan memperhatikan kondisi ekosistem mangrove yang rusak cukup luas yaitu sebesar 1,80 (satu koma delapan puluh) juta hektar, serta laju kerusakan yang cukup tinggi maka ditetapkan target tutupan ekosistem mangrove yang baik pada tahun 2045 sebesar 3,49 (tiga koma empat puluh sembilan) juta hektar, dengan tahapan sebagai berikut:

No.	Tahun	Luas Mangrove Yang Baik (Juta Ha)
1.	2017	1,69
2.	2019	1,75
3.	2024	1,95
4.	2029	2,27
5.	2034	2,69
6.	2039	3,15
7.	2044	3,47
8.	2045	3,49

KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE NASIONAL (PERMENKO No. 4 TAHUN 2017)

1. Pengendalian konversi ekosistem mangrove.
2. Peningkatan fungsi ekosistem mangrove dalam perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan garis pantai dan sumberdaya pesisir.
3. Pengelolaan ekosistem mangrove sebagai bagian integral dari Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Mitigasi perubahan iklim, RHL Mangrove



Ekologi

4. Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.
5. Pengelolaan ekosistem mangrove melalui pola kemitraan dengan dunia usaha sebagian dari upaya mewujudkan komitmen *green economy*.



Ekonomi
/sosial

6. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban pengelolaan ekosistem mangrove .
7. Pengembangan *capacity building*, riset, iptek dan sistem informasi untuk memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove.



Kelem-
bagaan

8. Komitmen politik dan dukungan kuat Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan para pihak terkait lainnya.
9. Koordinasi antar instansi untuk menjamin terlaksananya Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.



Politik

PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

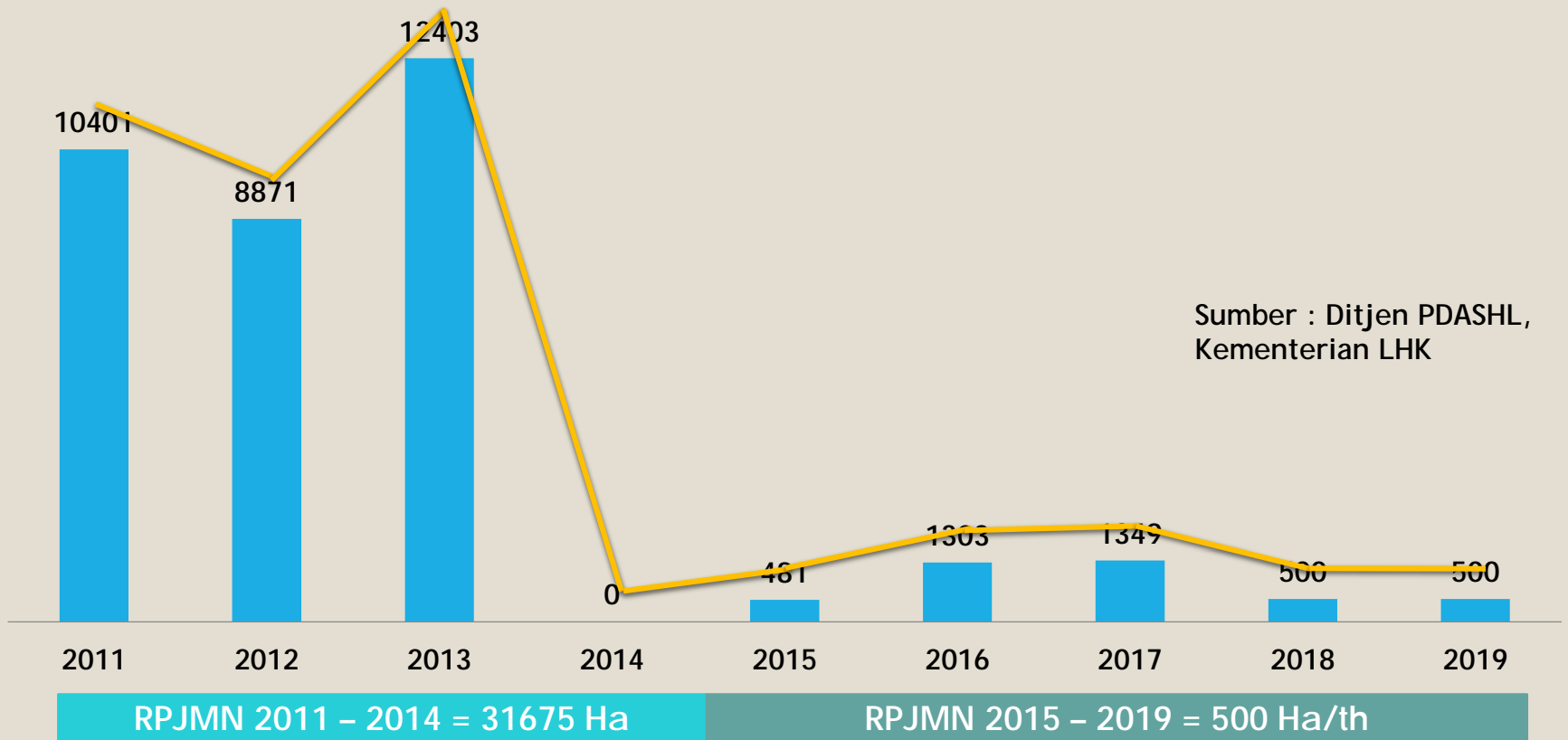
KEBIJAKAN INTERNAL PDASHL

1. Implementasi Program RHL mangrove sesuai target RPJMN) 2015 – 2019 → 500 ha/tahun.
2. Penyelesaian Penyusunan Satu Peta Mangrove Nasional (One Map Mangrove)
3. Penandatanganan MoU pelaksanaan RHL dengan swasta, BUMN/D untuk percepatan RHL mangrove

KEBIJAKAN LINTAS SEKTORAL

1. Implementasi Permenko No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional (pengelolaan mangrove dalam keseimbangan ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, perundangan)
2. Rencana Aksi RHL mangrove 65.000 ha per tahun

RENCANA DAN REALISASI RHL MANGROVE KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



RENCANA AKSI PEMULIHAN EKOSITEM MANGROVE S/D TAHUN 2045 (PERMENKO PEREKONOMIAN NO.4 TAHUN 2017)

No	Tahun	Luas Mangrove Baik (Juta Ha)	Rencana RHL Mangrove (Ha)	Kebutuhan Anggaran (Rp)
1	2018	1,69	60.000	0
2	2019	1,75	200.000	720 M
3	2024	1,95	320.000	2.400 M
4	2029	2,27	420.000	3.840 M
5	2034	2,69	460.000	5.040 M
6	2039	3,15	320.000	5.520 M
7	2044	3,47	20.000	3.840 M
8	2045	3,49	60.000	240 M
			1.800.000	21,6 T

Mangrove yang baik : 1,69
Juta Ha

Mangrove yang rusak: 1,80
Juta Ha

→ Biaya RHL P0, P1 dan P2
Rp 12.000.000,-/ha

→ Perlu anggaran rata-rata
Rp 800 miliar/tahun

Melalui: APBN, APBD, DAK,
DBH, CSR, MoU



RENCANA PENANGANAN EKOSISTEM MANGROVE LINTAS SEKTOR (STRANAS)

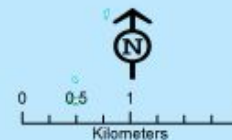
4 Kelola Aspek/Kegiatan	Kementerian/Lembaga Terkait								
	LHK	ATR	KKP	BIG	MENDA GRI	BAPPENA S	PEMDA	LIPI	BUMN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A. Ekologi									
1. Penyusunan kriteria kawasan lindung dan kawasan budidaya	V V	V	V	-	V	V	V	V	-
2. Inventarisasi kondisi ekologi mangrove pada kawasan lindung dan kawasan budidaya	V V	-	V	V	V	-	V	V	-
3. Penyusunan rencana terkait pengelolaan sumberdaya mangrove	V V	V	V	V	V	V	V	V	-
4. Pengembangan riset dan iptek pembibitan dan penanaman mangrove	V	-	V	V	V	-	V	V V	V
5. Pemulihan pada ekosistem mangrove alami dan buatan (RHL)	V V	-	V	-	V	V	V	-	V
B. Sosial Ekonomi									
1. Penguatan peran KKMTN/D	V	V	V	V	V V	V	V	-	V
2. Melaksanakan pertemuan nasional dan internasional tentang pengelolaan ekosistem mangrove	V V	V	V	V	V	V	V	V	V
3. Penyusunan materi dan pedoman pendidikan lingkungan ekosistem mangrove	V	V	V	V	V	V	V	V V	-
4. Fasilitasi dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan mangrove	V	V	V	-	V	-	V V	V	-

RENCANA PENANGANAN EKOSISTEM MANGROVE LINTAS SEKTOR (STRANAS)

4 Kelola Aspek/Kegiatan	Kementerian/Lembaga Terkait								
	MK PEREK	LHK	ATR	KKP	BIG	MENDA GRI	BAPPEN AS	PEMDA	LIPI
(1)		(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
C. Kelembagaan									
1. Penyusunan mekanisme kerjasama yang sinergis diantara multipihak	-	V	V	V	-	V V	V	V	V
2. Peningkatan peran institusi Pusat dan Daerah	V V	V	V	V	V	V	V	V	V
3. Peningkatan efektifitas koordinasi dan kerjasama Tim Koordinasi Nasional dan KKMTN/D	-	V	V	V	V	V V	V	V	V
4. Sinkronisasi dan harmonisasi mekanisme kerja dan hubungan kerja antar unit organisasi	-	V V	-	V	-	V	V	V	V
D. Perundang-undangan									
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan ekosistem mangrove	-	V V	V	V	V	V	V	V	-
2. Fasilitasi penyusunan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tk Provinsi	-	V V	V	V	V	V	V	V	V
3. Pelaksanaan penegakan hukum pengelolaan ekosistem mangrove	-	V V	-	V	-	V	-	-	-

VV : Penanggung jawab, V : Pendukung

RENCANA PEMULIHAN EKOSISTEM MANGROVE JAWA (RENCANA AKSI STRANAS MANGROVE)

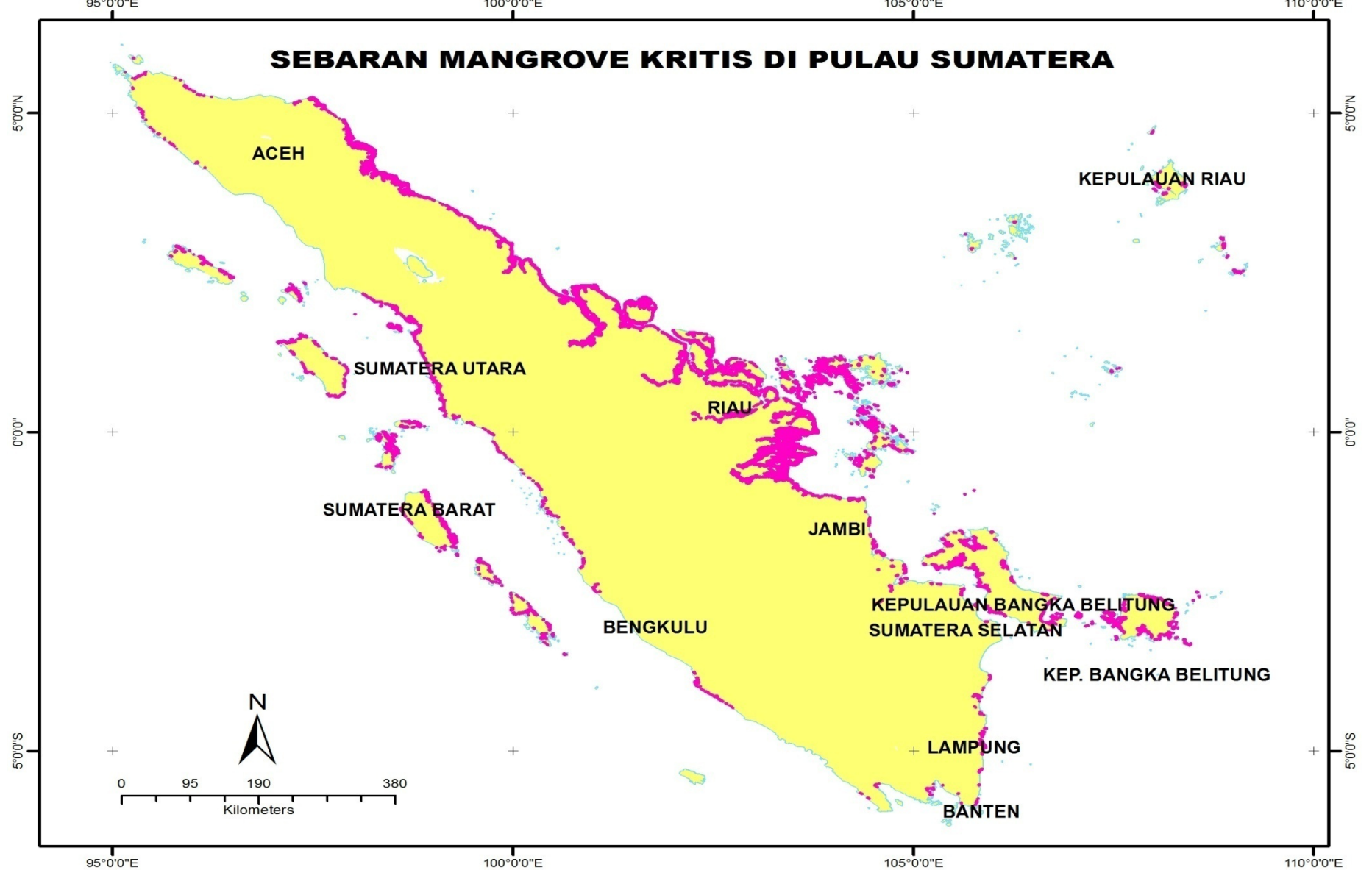


No.	Provinsi	Mangrove					Jumlah Ha
		Dalam Kawasan			Luar Kawasan		
		HK	HL	HP	KB	KL	
1	BANTEN	1944.33	392.54		610.26		2947.13
2	DKI JAKARTA	4.88	29.19		46.37		80.44
3	JAWA BARAT	38.48	2112.94	47.41	1503.88	3020.25	6722.96
4	JAWA TENGAH		2962.84	1079.61	131.75	32003.81	36178.01
5	JAWA TIMUR	273.59	1879.34	558.44	21390.18		24101.55
Jumlah (Ha)		2261.28	7376.85	1685.46	23682.44	35024.06	70030.09

RENCANA AKSI RHL MANGROVE 2018

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luar Kawasan	Dalam Kawasan	Jumlah (Ha)
			APL	HL	
Indramayu	Balongan		12,81		12,81
		Sukareja	12,81		12,81
	Cantigi		449,09	289,28	738,37
		Cangkring	72,17	152,4	224,57
		Lamarantarung	376,92	136,88	513,8
		Indramayu	44,55		44,55
		Karangsong	5,49		5,49
		Pabeanudik	7,48		7,48
		Singaraja	31,58		31,58
	Kandanghaur		101,48		101,48
		Bulak	47,62		47,62
		Eretan Wetan	1,47		1,47
		Ilir	25,21		25,21
		Parean Girang	27,18		27,18
	Krangkeng		34,08		34,08
		Kalianyar	12,59		12,59
		Krangkeng	21,49		21,49
	Losarang		134,21	630,63	764,84
		Cemara	134,21	630,63	764,84
	Pasekan		515,27	62,63	577,9
		Brondong	27,14		27,14
		Karanganyar	0,6		0,6
		Pabean Ilir	253,05	49,71	302,76
	Pasekan	234,48	12,92	247,4	
Jumlah			1291,49	982,54	2274,03

SEBARAN MANGROVE KRITIS DI PULAU SUMATERA



Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Luar Kawasan	Dalam Kawasan					TUBUH AIR	Jumlah
			APL	CA	HL	HP	TN	TNL		(Ha)
Sumsel	Banyuasin	Airsaleh	223,96		1911,58					2135,54
		Banyuasin dua	2314,07		8330,60	7600,43	93007,17	131,13	67,87	111451,28
		Makartijaya	300,34		3634,59					3934,93
		Muarasugihan	30,75		14783,48	386,69				15200,93
		Pulaurimau	1018,80		2272,27		559,46			3850,53
		Sumbermargatelang	1,63		279,24					280,86
		Tanjunglago	553,19		4524,84				2,80	5080,83
	BANYUASIN total		4442,74		35736,60	7987,13	93566,63	131,13	70,67	141934,90
	Musibanyuasin	Lalan	168,67			1258,66	310,80			1738,12
	MUSIBANYUASIN total		168,67			1258,66	310,80			1738,12
	Ogankomering ilir	Airsugihan	223,96		9055,55	81,62				9361,13
		Cengal	68,30		706,92					775,22
		Muarasugihan			1,49					1,49
		Sungaimenang	579,92		880,47	83,90			11,73	1556,03
		Tulungselapan	123,16		6125,92					6249,08
	OGANKOMERING ILIR total		995,34		16770,36	165,52			11,73	17942,95
SUMSEL total			5606,75		52506,96	9411,31	93877,43	131,13	82,40	161615,97

POLA RHL MANGROVE

Pola RHL
Mangrove

RHL Murni
1110 btg/ha
atau 1650
btg/ha

KBR Mangrove
Kelompok tani
1 unit -25 ha

Silvofishery
Kombinasi
antara tambak
dengan
mangrove



ARAHAN DAN REKOMENDASI

1. Keberhasilan RHL mangrove:
 - a. Jika ombak besar menggunakan rumpun berjarak dengan 10 – 15 batang
 - b. Jika ombak sangat besar menggunakan teknik APO
 - c. Jika lokasi tercemar maka tanam > 1650 batang/ha
 - d. Jika kondisi normal tanam 1100 batang/ha
 - e. Jika terdapat hama tritip gunakan bibit yang dilengkapi bronjong
 - f. Pemilihan jenis sesuai dengan substrat, salinitas dan zonasi
2. Target RHL tahun 2018 - 2045 seluas 1.800.000 ha dengan standar biaya Rp 12.000.000,-/ha diperlukan anggaran sebesar 21,6 T melalui Lembaga/Kementerian, Pemda, BUMN/D/S.
3. Pemberdayaan masyarakat agar diterapkan mulai dari kelembagaan, pengembangan usaha, diklat/pelatihan, pendampingan, pemasaran serta monitoring agar ditingkatkan.
4. Peta lokasi rencana RHL mangrove sampai tingkat kecamatan telah tersedia untuk Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali Nusra, Maluku, untuk Pulau Jawa tersedia sampai tingkat desa, sedangkan untuk Pulau Kalimantan dan Papua sampai tingkat kabupaten.
5. Terhadap kawasan lindung mangrove agar tetap difungsikan sebagai fungsi lindung, sedangkan pada kawasan budidaya mangrove dapat dikembangkan sesuai dengan usaha setempat memperhatikan fungsi ekologi dan sosial masyarakat.





**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2018**